

# Studi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Pengimplementasian Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Berbasis Elektronik

## *Study of Maros Government Readiness in Implementation Employee Attendance Information System Based Electronics*

Rukman Pala

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar  
Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No.25 Makassar Telp. 0411-4660084

rukmanpala@yahoo.co.id

Diterima: 1 November 2013 || Revisi: 13 Desember 2013 || Disetujui: 14 Desember 2013

**Abstrak** – Pegawai Negeri Sipil dituntut disiplin dalam bekerja, tetapi pada kenyataannya banyak pegawai yang tidak bekerja dengan baik karena terlambat masuk dan pulang lebih cepat. Oleh karena itu, perlu penerapan absensi sidik jari (*finger print*) untuk mengantisipasi hal tersebut. Maros merupakan kabupaten yang telah mempersiapkan implementasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKP) berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengimplementasian SIKP ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah siap mengimplementasikan SIKP baik dari segi kesiapan regulasi maupun infrastruktur.

**Kata Kunci:** PNS, Sistem Informasi Kehadiran, *finger print*, kesiapan

**Abstract** – *Civil Servants are required discipline in work, but in fact many employees do not work well due to late entry and return more quickly. Therefore, application of a fingerprint need to anticipate this. Maros is a district that has been preparing for the implementation of Employee Attendance Information System (EAIS) based electronics. The aim of this study was to obtain an overview of the readiness of the Maros Government about the implementation of SIKP. The method used is descriptive qualitative. The study concluded that the government was ready to implement SIKP both in terms of regulation and infrastructure readiness.*

**Keywords:** PNS, Attendance Information System, *finger print*, readiness

### PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sumber daya aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Dalam penyelenggaraan tugas negara, PNS sebagai abdi negara dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan peranan PNS di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi. Karena itu PNS senantiasa dituntut memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memusatkan seluruh perhatian, daya dan tenaga agar berdaya guna dan berhasil guna.

PNS di jajaran pemerintahan harus disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tanpa

disiplin, semua pekerjaan akan terbengkalai. Pembinaan pegawai juga harus terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga pegawai benar-benar disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tujuannya agar seluruh program yang dijalankan pemerintah dapat terwujud sesuai harapan masyarakat dan pemerintah. Tetapi dalam praktek sehari-hari, banyak pegawai cenderung tidak bekerja dengan disiplin karena terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dari jam kantor yang telah ditetapkan. Padahal, disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, serta berlakunya keputusan hukuman disiplin.

Disiplin pegawai juga diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (PNS wajib datang, melaksanakan

tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas). Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ jam sama dengan 1 hari tidak masuk kerja.

Sudah bukan rahasia umum lagi bila ada anggapan bahwa PNS itu santai, hanya datang dan absen saja dalam perilaku kerjanya sehari-hari. Ada juga PNS yang absensinya dititipkan pada teman lain. Hal ini sudah mengakar budaya sehingga perlu ada penegakan disiplin di instansi pemerintahan.

Hasil penelitian tentang pengaruh absensi elektronik *hand geometry* terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan menunjukkan bahwa pengaruh absensi elektronik *hand geometry* terhadap disiplin kerja pegawai hanya sebesar 56,25%, karena disiplin kerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh absensi elektronik *hand geometry* saja tetapi juga dapat dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam objek penelitian (Widodo, 2011). Hal ini menggambarkan bahwa sistem informasi kehadiran pegawai berbasis elektronik yang diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS adalah hanya salah satu variabel dari beberapa variabel lainnya yang berpengaruh untuk dapat meningkatkan kedisiplinan PNS.

Sistem absensi merupakan sebuah sistem yang diberlakukan di suatu instansi guna mencatat kehadiran pegawai. Selain untuk mendapatkan gambaran kehadiran pegawai juga sebagai bahan laporan yang akurat kepada pimpinan. Ada beberapa cara dalam mencatat kehadiran pegawai di suatu instansi, yaitu dengan cara manual dan atau dengan menggunakan mesin absensi. Cara manual seperti tanda tangan, perlahan sudah mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan mesin absensi. Hal ini untuk menghindari penitipan absensi dan perapelan absen. Sejak pertengahan 2010, banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menggunakan alat absensi elektronik yaitu *finger print*. Alat tersebut secara teknis mendukung upaya kehadiran pegawai dengan tepat waktu. Berdasarkan paparan tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah melihat kesiapan Pemkab Maros dalam pengimplementasian Sistem Kehadiran Pegawai berbasis elektronik ditinjau dari aspek kesiapan regulasi dan kesiapan infrastruktur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesiapan regulasi dan infrastruktur Pemkab Maros dalam pengimplementasian Sistem Informasi Kehadiran PNS berbasis elektronik. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan masukan mengenai aspek sistem informasi berbasis elektronik yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Menurut Yusnawati (2007:11), “kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill”. Menurut Suharsimi Arikunto (2001:54), “kesiapan adalah suatu kompetensi, sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu”. Menurut Slameto (2010:13), “kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”. Dari beberapa defenisi itu dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan dalam mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Suatu kondisi dikatakan siap, setidaknya-tidaknya mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010:14), “ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu: 1) Kondisi fisik, mental, dan emosional; 2) Kebutuhan atau motif tujuan; 3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari”. Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip *readiness* atau kesiapan yaitu: 1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi); 2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman; 3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan; 4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan (Reftina Kustyaning, 2012).

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen pada tingkat operasional. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Jogiyanto (2005) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Abdul Kadir, sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Definisi sistem informasi, yaitu: “sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan” (Kadir, 2003). Penjelasan diatas menerangkan bahwa sistem informasi dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai sumber daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. Sistem informasi juga dapat memudahkan pekerjaan di suatu perusahaan-perusahaan.

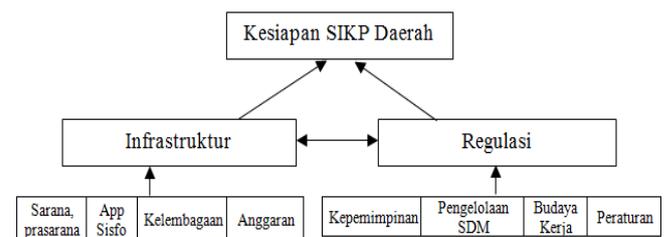
Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi adalah suatu institusi pemerintahan ditujukan agar suatu institusi pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri. Kriteria dari sistem informasi antara lain fleksibel, efektif, dan efisien. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi merupakan suatu perangkat kerja yang

dapat bekerja untuk memproses suatu masukan ataupun data, kemudian data yang telah diproses tersebut akan diproses dan menjadi suatu keluaran yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### Kerangka Fikir

Menilai kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem informasi kehadiran PNS dengan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bukti-bukti adanya upaya mendasar suatu daerah untuk melahirkan regulasi dan mengembangkan infrastruktur. Regulasi terdiri dari berbagai prakondisi yang harus dibenahi sebagai prasyarat berkembangnya sebuah sistem informasi, yakni kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan sistem informasi, budaya kerja dalam organisasi, dan peraturan-peraturan. Sementara itu, infrastruktur terdiri dari, sarana dan peralatan teknologi informasi, aplikasi sistem informasi, kelembagaan dan anggaran. Hal ini dapat berkembang baik bilamana regulasi konsisten dijalankan.

Secara logika, kemajuan pembenahan terhadap regulasi dan infrastruktur menggambarkan kesiapan suatu organisasi atau pemerintah menyelenggarakan sebuah sistem informasi.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah (Sugiono, 2007: 11). Adapun sampel penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Maros sebagai lembaga teknis yang menangani TIK dan aplikasi sistem informasi kehadiran pegawai negeri sipil di daerah. Kemudian pada satuan kerja yang setingkat dengan Badan, Dinas, Kantor dan kecamatan di ibukota kabupaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

wawancara mendalam kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan adalah pegawai baik pimpinan ataupun bawahan yang terlibat dalam kesiapan pemanfaatan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kominfo dan Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Kantor Kominfo yang terkait langsung
- 2) Tenaga ahli yang berkaitan dengan objek penelitian yang dipekerjakan Pemkab Maros
- 3) Beberapa staf yang terkait dan dapat memberikan jawaban tentang permasalahan penelitian.

Hasil penelitian kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengamatan dan pencermatan terhadap fenomena empiris di lokus penelitian dapat diketahui bahwa Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKP) atau *finger print* tidak dibangun khusus, tetapi dibangun terpadu dengan beberapa sistem informasi lainnya sesuai dengan Rancangan Induk Teknologi Informasi Kabupaten Maros 2012 – 2013 (Pemkab Maros, 2012).

Perencanaan absensi digital (*finger print*) di Pemerintah Kabupaten Maros menurut Nasrul S.IP, MM (Kasi Jaringan KPDE) telah dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur pada 2012 untuk semua SKPD. SKPD yang memiliki jumlah pegawai 200 orang akan dilengkapi dengan 2 buah *finger print*. Sedangkan SKPD yang jumlah pegawainya kurang dari 100 orang akan dilengkapi dengan sebuah *finger print*. Selain itu untuk memantau kehadiran pegawai secara fisik maka setiap ruangan dalam kantor sekretariat daerah dilengkapi dengan kamera CCTV dan selanjutnya juga akan dipasang minimal satu kamera CCTV di setiap SKPD.

Dualipa, staf KPDE Kabupaten Maros mengatakan bahwa khusus di kantor daerah lingkup sekretariat daerah dilengkapi 4 buah *finger print*. Penggunaan *finger print* dimulai pada awal 2013 di lingkup Sekretariat Daerah, dengan mengevaluasi beberapa permasalahan yang timbul, seperti pendataan pegawai, dan pencocokan pengguna sidik jari. Kemudian pada bulan ke 2 barulah mulai penerapan pada SKPD di

luar sekretariat daerah. Dan saat ini uji coba sudah memasuki tahap daerah terjauh tetapi masih *offline*, dimana penarikan data masih manual. Proses uji coba ini ditarget sampai Mei 2013. Jika sampai pada tahap ini tidak ada lagi kendala berarti maka semua sistem sudah dianggap siap untuk migrasi dari absensi manual ke digital. Terkecuali kantor kecamatan Camba dan Mallawa karena terkendala kondisi geografis, namun ditargetkan di 2013 dapat difungsikan sebagaimana SKPD yang ada di dalam kota. Pada awal pemberlakuan *finger print* ini banyak masalah yang terjadi sehingga pihak pengelola SIKP banyak menerima pengaduan dari pegawai diantaranya ada pegawai yang rajin melakukan *scan* sidik jari, namun setelah dicek ternyata tidak terbaca bahkan ada pegawai yang dianggap tidak melakukan *scan* sidik jari sehingga pengelola terus berusaha untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang memungkinkan merugikan pegawai.

Menurut Ansari S.Kom dan Gunandar S.Kom (tenaga ahli KPDE kabupaten Maros), *finger print* ini lebih memudahkan bupati untuk mengecek kehadiran pegawai karena tidak perlu berkunjung pada setiap SKPD atau meminta absensi dari BKD, tetapi hanya pada malam hari semua pegawai yang hadir dari semua SKPD dapat diketahui. Demikian juga dengan pemasangan CCTV agar tidak terjadi spekulasi dalam hal ini pegawai melakukan absen. Namun, belum semuanya SKPD dipasang CCTV dan diusahakan pada tahun 2013 semua SKPD sudah terpasang CCTV.

## Kesiapan Regulasi dan Infrastruktur

Kesiapan suatu daerah dalam menyediakan SIKP dapat dinilai dari kemajuan pada regulasi dan sarana prasarana, regulasi bersifat fundamental dan perkembangannya menentukan perkembangan pada sarana dan prasarana.

Regulasi yang sifatnya implisit terdapat kepemimpinan, manajemen SDM, budaya kerja, dan peraturan. sementara pada infrastruktur terdapat sarana TIK, aplikasi sistem informasi, kelembagaan dan anggaran.

Kepemimpinan yang sangat menentukan kesiapan SIKP sudah berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komitmen tinggi dari pimpinan puncak daerah yaitu Bupati. Hal ini dibuktikan dengan perhatian mengenai pembangunan sistem informasi dari berbagai kebutuhan pemerintah daerah.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap berbagai informan dari kalangan pejabat dan pelaksana teknis, terlihat adanya pelopor yang bisa menggerakkan pembangunan sistem informasi secara terkoordinasi. Memang selama ini sistem informasi yang ada umumnya dibangun oleh pemerintah pusat dan lebih terfokus untuk kepentingan pemerintah pusat. Misalnya untuk sistem informasi kesehatan, pemerintah pusat memberikan honor tambahan bagi pegawai Dinas Kesehatan untuk mengoperasikan sistem tersebut agar data bisa mengalir ke kementerian kesehatan.

**Manajemen SDM:** Pegawai dari kalangan PNS lebih difokuskan pada tugas merancang sistem informasi karena merekalah yang lebih tahu proses kerja di instansinya. Sementara tenaga kontrak difokuskan pada pembangunan aplikasi elektronik sesuai rancangan yang telah dibuat oleh PNS. Untuk pemeliharaan sistem, tenaga kontrak tetap berfokus pada sisi teknis dari sistem informasi.

**Budaya Kerja:** Budaya kerja dan nilai yang terkandung dalam TIK sudah mencapai titik temu. Dalam hal ini nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang terikut dalam TIK sudah merupakan prinsip kerja yang dianut dalam pemerintah. Oleh karena itu, TIK sebagai pendukung SIKP sangat cepat diterima di kalangan aparatur

**Peraturan:** Perkembangan budaya ke arah masyarakat informasi memerlukan proses yang bersifat evolusioner. Peraturan sering digunakan untuk melakukan perubahan dengan cepat. dalam penelitian ini, terungkap bahwa pemerintah kabupaten Maros memiliki rancangan induk TIK yang menjadi acuan atau pedoman dalam rangka pembangunan Sistem Informasi dimana pada 2012 pembangunan SIKP menjadi salah satu prioritas dan pemberlakuan pada 2013 dan hal ini sudah mulai berjalan pada awal 2013 walaupun masih banyak hal yang perlu dibenahi.

Infrastruktur SIKP juga bisa dipakai untuk menilai kesiapan suatu daerah dalam menyediakan SIKP, infrastruktur ini sering menjadi prioritas karena sifatnya yang kasat mata atau eksplisit. Dengan membangun infrastruktur TIK maka segera kelihatan, demikian juga halnya dengan penyediaan sarana, aplikasi sistem, pembangunan kelembagaan dan penyediaan anggaran. Efek yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur tidak terlalu fundamental dan sering tidak sustainabel bilamana tidak ditunjang regulasi yang kuat.

**Tabel 1** Indikasi Kesiapan Regulasi daerah menyediakan SIKP

| Elemen        | Implementasi  |
|---------------|---|
| Kepemimpinan  | Komitmen tinggi   |
| Manajemen SDM | Perhatian meliputi SDM aparatur   |
| Budaya Kerja  | Sinkron dengan hakekat yang terkandung dalam TIK  |
| Peraturan     | Terintegrasi dari semua sistem Informasi yang dimuat di dalam Rancangan Induk Teknologi Informasi Kabupaten Maros 2012 - 2013 |

**Sarana TIK:** Berbagai peralatan TIK baik yang berskala penggunaan untuk organisasi maupun personal dimanfaatkan secara sinergis. sarana SIKP sudah disiapkan pada semua SKPD pada akhir 2012 namun aksesnya dan aplikasinya dimanfaatkan pada 2013.

**Aplikasi Sistem Informasi:** Aplikasi SIKP secara *online* terakses pada Kantor Kominfo yang menjadi pusat data dan semua SKPD terakses sehingga permasalahan yang muncul maka pengaduannya kepada Kantor Kominfo.

**Kelembagaan:** Kantor Kominfo telah menyusun *grand design* yang sesuai penjelasan di atas hanya didasarkan pada peraturan atau peraturan daerah. Meskipun menurut Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 urusan perhubungan dan komunikasi/informatika serumpun dan dapat digabung, namun di Kabupaten Maros melahirkan satu perda tentang terbentuknya Kantor Kominfo Kabupaten Maros yang dulunya adalah bagian data dan elektronik dinaikkan statusnya menjadi Kantor Pusat Data dan Elektronik.

**Anggaran:** Memiliki basis anggaran yang bersumber dari APBD dan penganggaran ini sudah direncanakan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pembangunan ICT di kabupaten Maros berdasarkan renstra pembangunan TIK pada tiap tahunnya.

Kesiapan kabupaten Maros untuk melaksanakan SIKP berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa baik kesiapan regulasinya maupun kesiapan sarana dan prasarana sudah disiapkan pada tahun 2012 dan itu terlihat pada rancangan induk TIK kabupaten Maros. Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah kabupaten Maros untuk

membangun Sistem informasi khususnya SIKP dilaksanakan secara sungguh sungguh dan semua apartur pemerintah yang ada pada lingkup sekretariat daerah dan SKPD melukan pinger print pada saat masuk dan pulang kantor sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada PNS.

**Tabel 2** Indikasi Kesiapan Infrastruktur SIKP

| Elemen                    | Inplementasi   |
|---------------------------|--|
| Sarana TIK                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti kecenderungan yang lebih memudahkan pegawai</li> <li>• Tersedia secara merata/adil</li> <li>• <i>Sustainable</i>, sesuai perkembangan teknologi</li> <li>• Operational</li> </ul> |
| Aplikasi Sistem Informasi | Terintegrasi   |
| Kelembagaan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekeretariat</li> <li>• Dinas</li> <li>• Badan</li> <li>• Kantor</li> <li>• Rumah Sakit</li> <li>• Kecamatan</li> </ul>   |
| Anggaran                  | APBD   |

**Kendala dan Solusi *finger print***

1. Pemasalahan listrik di setiap SKPD yang terkadang tidak memenuhi standar atau terkadang putus, solusinya dengan menyiapkan UPS dan stabilizer yang cukup memadai.
2. PNS yang melakukan absen pagi hari belum menggunakan seragam PNS, solusinya dengan melakukan pemasangan CCTV di setiap SKPD. Namun untuk sementara ini pemasangan CCTV baru dilakukan di Kantor Bupati, untuk kedepannya direncanakan disetiap SKPD.
3. PNS pulang pada saat absen pagi dan kembai pada saat absen pulang, solusi dengan menambah jadwal absen dari sebelumnya hanya pagi (masuk) dan sore (pulang) ditambah dengan istirahat (siang).

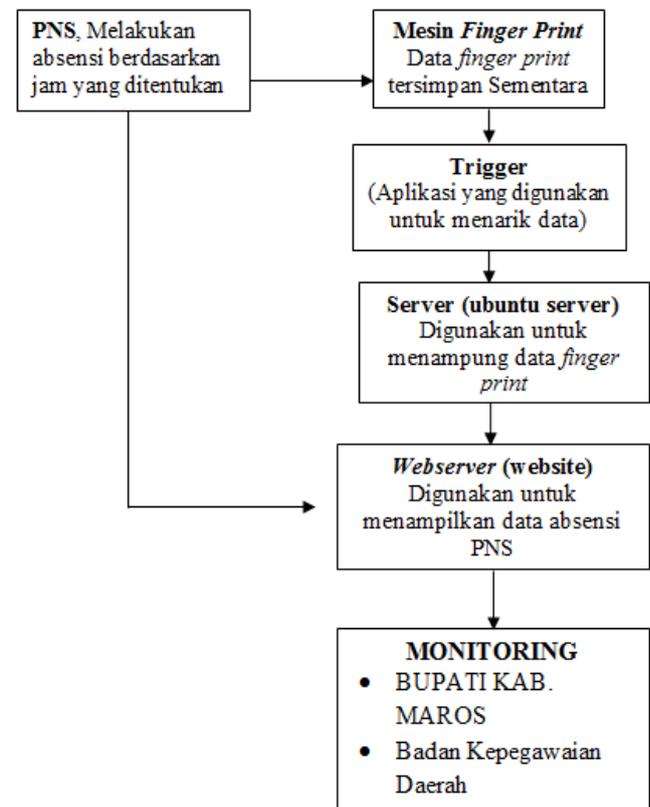
**Infrastruktur Jaringan *finger print* di SKPD**

Perangkat *finger print* di setiap SKPD terhubung dengan server menggunakan jaringan wireless pada frekuensi 5,8. Perangkat *finger print* terhubung dengan server secara real time, untuk keperluan sinkronisasi jam dan data pegawai, tetapi untuk penarikan data absensi dilakukan tiap jam 24:00. Hal

ini dilakukan untuk menjamin kelancaran, dan mencegah terputusnya koneksi dari perangkat client di SKPD dengan *server*.

Secara struktur teknis, aplikasi *finger print* terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :

1. Perangkat *finger print (client)*
2. Aplikasi *Trigger*, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menarik data disetiap SKPD sesuai jadwal yang ditentukan. Aplikasi *Trigger* ini yang menterjemahkan data dari *client* ke *server*.
3. *Server*, digunakan untuk menampung data absensi pegawai kurang lebih 2.300 pegawai.



**Gambar 2** Cara kerja aplikasi *finger print* Kab. Maros

Perangkat *finger print* yang digunakan, bersifat *standalone* dimana jika dalam kondisi jaringan LAN antara *client* dan *server* terputus, maka masih bisa digunakan untuk melakukan absensi oleh PNS, dan penarikan data dilakukan dengan menggunakan *flashdisk*.

**SDM Pengelola Aplikasi**

Saat ini untuk menjalankan beberapa program *e-government* seperti *SMS-center*, *e-absensi*, *website* dan beberapa program lainnya, Pemkab Maros menggunakan tenaga *outsourcing* yang dikontrak selama setahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Maros.

## Rencana Kedepannya

Saat ini hampir semua aplikasi yang dijalankan bersifat *online*, oleh karena itu penambahan BTS sebagai jalur *backbone* ke beberapa lokasi masih terus dilakukan kedepannya. Saat ini sementara proses pengerjaan adalah *site* Makarua untuk mengcover kecamatan Cenrana, Camba dan Mallawa.

Proses migrasi dari absensi manual beralih ke absensi digital bukan tanpa masalah berbagai kendala baik teknis maupun nonteknis bermunculan, tetapi sampai saat ini masih bisa diselesaikan dengan baik. Untuk kendala nonteknis hadir pada awal-awal penerapan kebijakan ini, dimana ada beberapa PNS memberikan kritikan seperti kesalahan data pegawai dimana ketika dicocokkan antara data sidik jari dengan ID pengguna, kendala ketidakmampuan mesin membaca beberapa model sidik jari PNS, hal ini mungkin disebabkan karena cacat pada tangan PNS, namun solusinya dengan memberikan PIN dan *password* khusus sebagai pengganti Absensi.

## Tantangan Aplikasi E-Absensi

Pengaplikasian absensi elektronik (e-absensi) memiliki banyak tantangan di lapangan dalam penerapannya, baik secara teknis dan non-teknis, di antaranya :

1. Kerusakan pada alat e-absensi itu sendiri yang diakibatkan oleh penggunaan yang terus menerus ataupun ada kerusakan teknis alat.  
Solusi : Disediakan alat cadangan sebagai pengganti apabila terjadi kerusakan tersebut.
2. Sumber daya pendukung jalannya mesin e-absensi yang kurang memadai, sebagai contoh asupan listrik yang tidak memadai untuk menyalakan mesin e-absensi (kurang dari 220 v), ataupun listrik padam dalam jangka waktu lama.  
Solusi : Pemasangan UPS dan *stabilizer* untuk membackup catu daya listrik di tiap-tiap kantor, serta pemasangan *surge protector* untuk menjaga alat dari lonjakan tegangan listrik.
3. Kerusakan alat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pegawai.  
Solusi : Pemasangan alat pengaman alat serta pemasangan CCTV di tiap-tiap kantor SKPD.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas bahwa Pemkab Maros telah siap dari segi regulasi dimana faktor kepemimpinan memiliki komitmen

yang tinggi, manajemen SDM telah diatur dengan baik, budaya kerja sudah sinkron dengan hakekat yang terkandung dalam TIK dan peraturan sudah terintegrasi dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Kabupaten Maros 2012-2013. Sedangkan kesiapan Infrastruktur yaitu: Sarana TIK telah tersedia, aplikasi sistem informasi telah terintegrasi, kelembagaan sudah siap, dan anggaran telah dimasukkan dalam APBD.

Penggunaan *finger print* sudah dimulai sejak awal 2013 di lingkup sekretariat daerah, dengan mengevaluasi beberapa permasalahan yang timbul, seperti pendataan pegawai, dan pencocokan pengguna sidik jari. Kemudian pada bulan ke 2 barulah mulai penerapan pada SKPD di luar sekretariat daerah. Saat ini uji coba sudah memasuki tahap selanjutnya daerah terjauh tetapi masih *offline*, dimana penarikan data masih manual. Proses ujicoba ini ditarget sampai bulan 5 tahun 2013. Jika sampai pada tahap ini tidak ada lagi kendala berarti maka semua sistem sudah dianggap siap untuk migrasi absensi dari manual ke digital.

Hasil penelitian ini juga melahirkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Maros agar dapat menjadi contoh dari kabupaten lainnya dengan menggunakan *finger print* pada PNS diseluruh SKPD penggunaan ini diawali dengan perencanaan melalui rancangan induk TIK pemerintah Kabupaten Maros dengan kesiapan regulasi dan infrastruktur.

Penggunaan SIKP ini harus dipertahankan walaupun terdapat kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis, karena apabila SIKP macet dan tidak difungsikan maka Pemerintah Kabupaten Maros mengalami langkah mundur dibidang pembangunan TIK khususnya Sistem Informasi Kehadiran Pegawai berbasis elektronik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Kantor PDE Kabupaten Maros dan seluruh informan yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir (2003), Perancangan Sistem Informasi, Andi Jogjakarta
- Jogiyanto, HM. (2005). Analisis Dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: ANDI.
- Pemkab Maros (2012). Rencana Induk Teknologi Informasi Kabupaten Maros 2012-2013

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Reftina Kustyaning, A. (2012). Kkesiapan SMP Negeri 1 Bantul dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menuju Sekolah Bertaraf Internasional. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved 12 20, 2012, from [http://eprints.uny.ac.id/8002/](http://eprints.uny.ac.id/http://eprints.uny.ac.id/8002/)
- Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Widodo, A., (2011). Pengaruh Absensi Elektronik *Hand Geometry* Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
- Yusnawati. (2007). Kesiapan berwirausaha siswa jurusan kecantikan SMKN. Skripsi. Yogyakarta:FT UNY